



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MENGAWAL KUALITAS DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2024

**Sidiq Budi Sejati**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
*sidiq.sejati@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menemukan sejumlah permasalahan dalam pendistribusian logistik Pemilu di tahap pertama periode 13 September-11 November 2023 ataupun tahap kedua pada 15 November 2023-14 Januari 2024. Dari pantauan Bawaslu pada proses distribusi tahap pertama terdapat kotak surat suara rusak di 117 kabupaten/kota, bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota, tinta rusak di 124 kabupaten/kota, segel rusak di 30 kabupaten/kota dan salah tujuan distribusi terjadi di 10 kabupaten/kota. Untuk distribusi di luar negeri di antaranya terdapat surat suara yang tidak tepat jumlah di 29 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), kelebihan surat suara di 32 PPLN, kelebihan surat suara untuk tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS LN) di 14 PPLN. Bawaslu menyimpulkan beberapa faktor kendala pada distribusi tahap pertama yaitu terkait koordinasi, akses dan informasi, sarana transportasi kendaraan, cuaca, geografis, serta keamanan dan jarak tempuh. Begitu juga dengan proses distribusi tahap kedua tidak jauh berbeda dengan permasalahan pada distribusi tahap pertama.

Pemerintah telah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai distributor logistik dalam Pemilu 2024, mulai dari surat suara hingga alat pendukung penyelenggaraan Pemilu. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R Joemadi mengatakan terus berkoordinasi dengan KPU dalam upaya mengantisipasi terkait ketepatan waktu. PT Pos Indonesia juga bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Damri, PT Pelni, PT Pelindo, PT PPD, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa Pura II. Selain bekerja sama dengan BUMN, PT Pos Indonesia juga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan swasta agar pendistribusian surat suara dapat tepat waktu. Setidaknya terdapat 10 ribu armada dan 4.500 titik yang telah disiapkan untuk pendistribusian surat suara serta sejuta rute domestik dan 200 negara tujuan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Berdasarkan laporan yang diterima dari sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, jumlah surat suara yang rusak diperkirakan kurang dari 1 persen dari total lima jenis surat suara atau sekitar 1,2 miliar lembar. KPU juga dituntut agar dapat konsisten menjalankan Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilu. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati mengatakan penggunaan Sistem Informasi Logistik (Silog) harus dioptimalkan untuk memantau pergerakan produksi dan distribusi logistik, transparansi terhadap pendistribusian logistik dapat mengurangi potensi serangan hoaks karena masyarakat sudah terinformasikan dengan baik. Potensi kerusakan surat suara juga masih cukup besar setelah proses distribusi sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS) karena terdapatnya potensi cuaca buruk menjelang pemungutan suara sehingga gudang-gudang penyimpanan rentan lembab bahkan banjir. Oleh karena itu, KPU juga harus dapat memastikan kondisi gudang penyimpanan logistik di tingkat kecamatan hingga TPS benar-benar layak untuk digunakan.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspari Gaus juga meminta KPU untuk terus berkoordinasi dengan seluruh KPU daerah untuk menginventarisasi jumlah surat suara yang rusak dan kemudian mengirimkan kembali pengganti surat suara sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. KPU juga harus cermat memperhitungkan dan memitigasi potensi kerusakan surat suara yang cukup besar setelah didistribusikan ke kecamatan, kelurahan, dan TPS dikarenakan terdapatnya potensi cuaca buruk dan hujan. Oleh karena itu, KPU juga harus memastikan gudang tempat penyimpanan logistik Pemilu benar-benar aman dan memadai.

## Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi II dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat ikut berperan serta, di antaranya mendorong KPU agar dapat konsisten dalam menjalankan tata kelola logistik Pemilu sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilu, terutama optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) sepanjang proses distribusi berjalan. KPU juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang diberikan atau ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan perlengkapan pemungutan suara Pemilu, mulai dari tahap pengadaan sampai dengan pendistribusian akhir. Selain itu, Komisi II mendorong Bawaslu untuk terus melakukan pengawasan melekat dan memberikan saran perbaikan terhadap kinerja KPU, terkait pemutakhiran data logistik seperti jadwal distribusi logistik sampai masa pemungutan suara, kuantitas dan kualitas logistik, serta proses pengamanan logistik.

## Sumber

bawaslu.go.id, 8 Januari 2024;  
dpr.go.id, 9 Januari 2024;  
kompas.id, 7 Januari 2024;  
suara.com, 11 Juli 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024